



Analysis of the Government's Role in Social Development Based on Development Administration at the Medan Mayor's Office

Analisis Peran Pemerintah dalam Pembangunan Sosial Berdasarkan Administrasi Pembangunan di Kantor Walikota Medan

Maulana M Hamzah ¹⁾; Andri Soemitra²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ maulanahamzah238@gmail.com; ²⁾ andrisoemitra@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 Mei 2022]

Revised [30 Mei 2022]

Accepted [9 Juni 2022]

KEYWORDS

Development
Administration, Resource

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Administrasi pembangunan merupakan bagian administrasi dari pembangunan, dimana pada umumnya memakai pendekatan manajemen, sebab mempunyai hubungan oleh manajemen pembangunan. Pada kasus ini, manajemen pembangunan tersebut termasuk ke dalam perencanaan pembangunan, pengerahan sdm serta penganggaran. Semua aspek tersebut dibutuhkan sebab melihat kebutuhan pembangunan yang lebih besar dari ketersediaan sumber yang ada. Oleh karenanya, perencanaan dalam sebuah pembangunan diperlukan untuk dapat memutuskan hasil yang sesuai dengan visi pembangunan. Kemudian, perencanaan pembangunan harus sejalan dengan pengerahan sumber daya yang optimal serta penganggaran yang tepat.

ABSTRACT

Administration for development is the administration of and for development, which usually uses a management approach, because it is concerned with development management. In this case, development management includes development planning, resource mobilization and budgeting. All of these aspects are necessary because they see development needs that are greater than the availability of existing resources. Therefore, development planning is needed to make right judgements in accordance with the development vision. Development planning must be in line with optimal resource mobilization and appropriate budgeting.

PENDAHULUAN

Tugas pokok pemerintah daerah adalah sebagai pemberdayaan masyarakat. Tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat adalah dengan kepentingan pembangunan. Pembangunan yang optimal dapat dimulai dari membenahi sumber daya manusianya. Pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan di Indonesia karena memiliki kendali atas apa yang akan direncanakan, untuk itulah penulis melakukan analisis peranan pemerintah di dalam pembangunan untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah telah terlibat dalam proses pembangunan.

Didasari dari pemikiran pengelolaan sumberdaya yang bersumber dari warga lokal merupakan suatu manajemen, mencoba menghadirkan jawaban dari tantangan pembangunan yaitu kemiskinan, lingkungan hidup yang buruk serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam sebuah proses pembangunan yang menyangkut diri mereka.

Dilandaskan dari buah pikiran yang telah disebutkan, hal itu merupakan prosedur perencanaan pembangua yang berorientasi pada insan (peoplecenterd development) yang berfokus pada bidang teknologi, pembelajaran sosial (social learning) serta seni manajemen perancangan program yang mempunyai tujuan untuk menaikkan kemampuan masyarakat dalam pengaktualisasi diri mereka (empowerment).

Pada cakupan yang lebih besar, pemberdayaan masyarakat merupakan masyarakat yang tidak memiliki daya (powerless) yang kemudian diberikan suntikan kekuatan (power) melalui pemberdayaan sehingga masyarakat tersebut memiliki kekuatan (powerfull).

Lebih jelasnya, yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kekuatan yang didasari oleh kelemahan masyarakat. Adapun tujuannya sebagai usaha pemerintahan dalam mensejahterakan rakyat melewati tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan serta ketertinggalan masyarakat. Masyarakat pada posisi lemah membutuhkan bantuan berasal dari pemerintah supaya memiliki daya dan memiliki kemandirian. Pada posisi ini juga pemerintah yang komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat berarti sudah menjalani prinsip dari demokrasi.

Setiap pemerintah daerah serta perangkatnya wajib berpartisipasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakatnya. Terutama untuk mendorong, mendukung dan memberikan motivasi pada setiap individu agar kemampuan yang dimiliki dapat berguna untuk kelangsungan hidupnya, dan memberikannya pilihan untuk dapat hidup dengan mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selama ini pada realitasnya, usaha pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat masih belum praktis.

Rendahnya komitmen dari aparaturnya membuat sikap birokrasi lokal masih tidak cukup mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti rendahnya tingkat pendidikan rakyat, dilema struktur sosial yang mengganggu, masyarakat yang terisolasi, adat masyarakat yang bersifat kurang baik serta persepsi galat yang sudah terbentuk pada rakyat ialah persetujuan awam pemerintah ketika menjalankan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat.

Goresan pena ini memfokuskan peranan pemda dan juga perangkatnya dalam menjalani tugas dan fungsi pemberdayaan warga yg absolut untuk dilaksanakan. Yang dimaksud dari pemberdayaan masyarakat difokuskan pada bermacam aspek yang bersangkutan menggunakan kehidupan warga menjadi komunitas bangsa, yaitu pemberdayaan pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, psikologi, dan politik.

LANDASAN TEORI

Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Peranan diambil dari kata peran (berasal dari sebutan untuk seni film/drama), yang berarti laku, bertindak, pemeran, pelaku, pemain, peranan, yaitu fungsi, kedudukan, bagian kedudukan (Dahlan, 1994 : 501). Peranan, dalam konteks di kelembagaan yang berbeda, merupakan unsur dinamis dari sebuah organisasi tertentu, lembaga yang mewakili tata institusional.

Peranan adalah sebuah pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan disini adalah pemerintah daerah, gubernur, bupati dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur-unsur pemerintahan daerah. (Berger dan Luckmann 1982 : 92).

Indikator kemajuan sebuah negara yang dikatakan baik apabila segi sosial, ekonomi, pendidikan dan politiknya sudah baik dan dapat terealisasi dengan optimal di negara tersebut. Pembangunan dari keseluruhan aspek yang telah disebutkan erat kaitannya dengan peran pemerintah yang bertugas untuk mengatur semuanya.

Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah artinya adalah pelaksanaan kebijakan dari pemberdayaan masyarakat yaitu walikota, bupati, gubernur dan juga perangkat wilayah yang mempunyai tujuan untuk mempertinggi kemampuan dari masyarakat, dan juga persiapannya pada masyarakat yang berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, serta kemampuan agar dapat menaikkan kualitas diri masyarakat agar dapat menentukan masa depan mereka, dan juga bisa berpartisipasi serta mensugesti pelaksanaannya secara nyata di suatu wilayah.

Pelaksanaan fungsi pemda tadi dapat dikategorikan berhasil apabila warga wilayah setempat sudah mencoba asal aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik.

Fungsi administrasi pembangunan adalah sebagai berikut.

- 1) perencanaan
- 2) pengerahan sumber daya
- 3) pengerahan partisipasi masyarakat
- 4) penganggaran
- 5) pelaksanaan pembangunan
- 6) koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

Sumber daya manusia menegaskan mengenai pentingnya tenaga kerja organisasi. Kontribusi bagi pencapaian tujuan dari organisasi sebagai sdm, terdapat sebuah kepastian, pelaksanaan fungsi



dan kegiatan organisasi dilaksanakan secara efisien untuk keuntungan individu, organisasi dan masyarakat.

Perbedaan antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat acap kali sulit untuk mencari perbedaannya. Mengarah pada pengertiannya yang juga berdekatan artinya dalam masyarakat. Dalam bahasan ini, pemberdayaan masyarakat serta pembanguana masyarakat

Dalam bahasan ini, baik pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan masyarakat difungsikan sebagai pengelolaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah guna memfasilitasi masyarakat lokal dalam membuat perencanaan, membuat keputusan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga mereka dapat mempunyai kemampuan serta mampu secara mandiri berkelanjutan dalam hal ekonomi, ekologi, dan sosial. Maka dari itu, pemberdayaan masyarakat sangat berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang turut memerlukan prasyart keterlanjutan masyarkat yang mandiri dari segi ekonomi, sosial dan ekologi.

Pemberdayaan masyarakat ialah gagasan pembangunan segi ekonomi yang turut merangkum nilai-nilai masyarakat guna membentuk deklinasi baru di dalam pembangunan bersifat peoplecentered, participatory, empowerment and sustainblem (Chamber, 1995). Lebih lanjut, Chamber mengatakan, bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai upaya dalam mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Peningkatan kekuatan yang berasal dari kelemahan merupakan aspek di dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan serta kemampuan untuk menaikkan kecakapan bagi warga untuk kelangsungan masa depan mereka dan untuk berpartisipasi serta mempunyai pengaruh dalam kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri (lfe, 1995 / 182).

Alternatif dalam pembangunan sebuah Negara dapat dimulai dari meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam sebuah pembangunan sudah banyak berkembang pemikiran serta literatur, meskipun pada kenyataannya pada implementasinya belum maksimal. Pembangunan serta pemberdayaan masyarakat ialah sebuah fenomena krusial yang patut dibicarakan oleh masyarakat sebab terkait hal ini, perubahan serta kemajuan Negara ini jika hal ini terkait oleh kecakapan masyarakat yang terbilang belum mumpuni dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pemerintah sudah mengatur beberapa kebijakan, yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat tertulis dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam "Arah Kebijakan Pembangunan Daerah" antara lain dinyatakan "mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI"
2. Dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "halhal yang mendasar dalam undang-undang ini ialah untuk menyokong pemberdayaaan masyarakat, serta menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat"
3. menelaah kedua rumusan Kebijakan Pemerintah diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa "kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah;
4. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000. Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyatakan, tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk menunjang keberdayaan masyarakat melewati lembaga dan institusi oleh masyarakat sekitar, pengendalian fenomena kemiskinan serta perlindungan masyarakat sosial, peningkatan swadaya masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik"
5. Sebagai upaya mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat , Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Visi Pemberdayaan Masyarakat ialah meningkatkan kemandirian masyarakat
- b. Misi dari Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian, lalu secara bertahap masyarakat dapat secara mandiri membangun diri dan lingkungannya.

Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud disini adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat menciptakan dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan.

Dalam membangun bangsa dan masyarakat yang mandiri berarti diperlukan adanya kestabilan ekonomi bagi warganya.

Ekonomi sangat berpengaruh dalam sebuah pembangunan. Apabila keadaan ekonomi seseorang berada pada tingkat kecukupan maka aspek lain seperti pendidikan, hubungan masyarakat, sosial akan juga turut berpengaruh dalam perkembangan pembangunan di Indonesia. Terutama pendidikan, yang memiliki peranan besar dalam membangun Indonesia. Setiap hal-hal mendasar yang akan diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan yang kita dapatkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Terkait data yang dihasilkan terhadap perubahan pola pikir masyarakat dengan adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan mendapatkan hasil dari mewawancarai warga, baik yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan menyaksikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Pemerintah dalam Pembangunan Sosial Berdasarkan Administrasi Pembangunan di Kantor Walikota Medan

Proses pengendalian usaha administrasi Negara buat merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah keadaan yang di katakan dapat baik, dan untuk kemajuan pada pada berbagai aspek kehidupan bangsa merupakan tujuan dari administrasi pembangunan. Berdasarkan Bintoro Tjokroamidjojo, administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian perjuangan (administrasi) oleh negara/ pemerintah buat mewujudkan pertumbuhan yg direncanakan ke arah suatu keadaan yang disebut lebih baik serta kemajuan pada pada banyak sekali aspek kehidupan bangsa.

Administrasi Pembangunan memiliki tugas pokok pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan yang meliputi perencanaan, penyusunan serta petunjuk teknis aplikasi pembangunan serta penyusunan laporan tahunan program pembangunan.

Di kantor walikota medan, administrasi pembangunan melakukan pengelolaan tugas-tugas pemerintah yang meliputi perencanaan, penusunan dan petunjuk teknis dari pelaksanaan pembangunan dan penyusunan laporan tahunan program pembangunan. Adapun tugas bagian administrasi pembangunan di kantor walikota medan, antara lain :

- a. Pembentukan program kerja pada bidang administrasi pembangunan
- b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan
- c. Pengawasan pembinaan dan pengendalian dalam bidang administrasi pembangunan
- d. Peninjauan serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan dinas dan badan serta instansi lainnya di bidang administrasi pembangunan



- f. Pengumpulan data dan penyampaian laporan realisasi kegiatan pembangunan
- g. Tugas yang diberikan dan dilaksanakan oleh asisten perekonomian dan pembangunan sesuai dari tugas yang diberikan.

Adapun pembagian kerja di kantor walikota medan, yaitu sebagai berikut :

Bagian Hukum

Yang dipimpin kepala bagian, termasuk ke dalam bagian hukum yang ada dibawah tanggung jawab kepada Sekretaris daerah melewati asisten administrasi umum.

Tugas pokok dari bagian hukum antara lain adalah membantu Sekretaris Daerah melalui asisten administrasi umum dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian perangkat daerah lingkup hukum dan peraturan perundang-undangan, pembinaan administrasi, bantuan hukum, evaluasi, dan dokumentas peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dikatakan pada ayat (1) bagian hukum menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bagian hukum
- b. Perumusan kebijakan pemerintahan daerah dalam ruang lingkup hukum dan peraturan perundang-undangan, dokumentasi perundang undangan, bantuan hukum.
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup hukum dan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- d. Persiapan pertimbangan serta pertolongan hukum kepada semua unsur pemerintahan daerah terhadap masalah hukum yang muncul dalam pelaksanaan tugas
- e. Pelaksanaan tugas dari perangkat daerah dikoordnasikan dan disesuaikan dengan ruang lingkup hukum serta peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi, dan dokumentasi perundangundangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang dimaksudkan ayat 1 dan 2 : Bagian hukum membawahkan 3 bagian yang meliputi sub bagian peraturan perundangundangan, sub bagian hukum, dan sub bagian evaluasi dan dokumentasi. Sub bagian peraturan perundang-undangan dipimpin oleh tiap-tiap sub bagian, yang ada di bawah serta yang menanggung jawabkannya kepada kepala bagian hukum.

Pada dasarnya, administrasi pembangunan berawal dari administrasi Negara. Maka awamnya administrasi Negara pula berlaku pada administrasi pembangunan. di dalam studi serta praktiknya, administrasi pembangunan dibutuhkan komitmen serta perhatian terhadap nilai-nilai yg didasari dan harus diwujudkan sebagai dasar etika birokrasi, oleh karenanya adanya sistem administrasi Negara sebagai prasyarat bagi berhasilnya sebuah pembangunan.

Adapun beberapa unsur administrasi Negara yang menjadi sasaran administrasi pembangunan, ialah:

1. pembangunan sumber daya manusia,
2. kelembagaan pengembangan,
3. peningkatan daya kerja,
4. penumbuhan pandangan yang baik,
5. budaya istitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek.

- Dadang Solihin, S. E. (2021). ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. Jakad Media Publishing.
- Septiani, S. (2020). Administrasi Pembangunan.
- Siagian, S. P. (2000). Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya. Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, B. (1988). Kebijakan dan administrasi pembangunan: perkembangan teori dan penerapan.